

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND REGIONAL  
FINANCIAL MANAGEMENT ON THE FINANCIAL PERFORMANCE  
OF THE KARAWANG REGIONAL GOVERNMENT IN 2022***

**Yunanti Eva Mandasari<sup>1\*</sup>, Tubagus Ahmad Darajat<sup>2</sup>; Nunung Nurhasanah<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

[yunantievamandasari@gmail.com](mailto:yunantievamandasari@gmail.com)<sup>1</sup>, [tubagusahmaddarajat@fe.unsika.ac.id](mailto:tubagusahmaddarajat@fe.unsika.ac.id)<sup>2</sup>;

[nunungnurhasanah@feb.unsika.ac.id](mailto:nunungnurhasanah@feb.unsika.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to determine and analyze the influence of financial performance on 3 SKPDs, namely the Secretariat of the Karawang Regency People's Representative Council, the Karawang Regency Regional Inspectorate and the Karawang Regency Regional Financial and Asset Management Agency in 2022 in terms of regional financial management, accountability and transparency. The sample used in this research was 3 SKPD employees with a total of 99 out of a total population of 187 employees. The data analysis method used is a descriptive verification method using primary data types and an analysis method using path analysis. The results of research on correlation analysis show that there is a significant relationship between regional financial management and accountability but has a low level of relationship, there is a significant relationship between accountability and transparency but has a low level of relationship and there is no significant but positive relationship between regional financial management with transparency because it has a very low level of relationship. Meanwhile, the results of path analysis research show that regional financial management partially influences the regional financial performance of Karawang Regency because it has an influence of 13.64%, accountability partially influences the regional financial performance of Karawang Regency because it has an influence of 5.63% and transparency partially influences the regional financial performance of Karawang Regency because it has an influence of 8.55%. Based on the overall results, it shows that regional financial management, accountability and transparency simultaneously influence the regional financial performance of Karawang Regency because it amounts to 27.8% while the remaining 72.2% is the contribution of other variables not studied ( $\epsilon$ ).*

**Keywords:** *financial management, accountability, transparency, financial performance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan pada 3 SKPD yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang tahun 2022 dilihat dari pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai 3 SKPD dengan jumlah 99 dari total populasi sebanyak 187 pegawai. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan jenis data primer dan metode analisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian pada analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas namun memiliki tingkat hubungan yang rendah, terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas dengan transparansi namun memiliki tingkat hubungan yang rendah dan tidak terdapat hubungan yang

signifikan namun positif antara pengelolaan keuangan daerah dengan transparansi karena memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah. Sedangkan hasil penelitian analisis jalur diperoleh bahwa pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena memiliki pengaruh sebesar 13,64%, akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena memiliki pengaruh sebesar 5,63% dan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena memiliki pengaruh sebesar 8,55%. Berdasarkan hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena sebesar 27,8% sedangkan sisanya 72,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti ( $\epsilon$ ).

**Kata Kunci:** pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, kinerja keuangan

## PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik, salah satunya pemerintah, adalah organisasi yang berusaha memberikan pelayanan publik terbaik. Karena pelayanan publik memengaruhi banyak aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat yang sangat luas maka tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik semakin kuat. Secara visual, kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Hal itu nampak terlihat dari keluhan masyarakat yang sering bermunculan terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Pasalnya masyarakat pengguna pelayanan publik seringkali mengeluh tentang persyaratan yang tidak sederhana dengan waktu proses pelayanan seringkali tidak dapat dipastikan serta terkesan berbelit-belit dalam prosesnya. Dengan demikian bahwa penting bagi setiap organisasi, terutama di sektor pemerintahan, untuk menerapkan tata kelola yang baik agar organisasi publik berkembang dengan baik karena dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat dapat lebih berkembang lagi.

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran pencapaian dari kegiatan, program atau kebijakan sebagai perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Mahsun; Edowai, 2021). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik jika mereka mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Kinerja keuangan daerah juga dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah

(Suryani & Robinsyah, 2022) secara akuntabel dan transparan, sehingga penilaian kinerja dapat menunjukkan kondisi yang ideal. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjawab segala hal tentang langkah-langkah dari semua keputusan dan proses yang dilakukan, serta bertanggung jawab atas hasil kerjanya (Edowati *et al.*, 2021). Dan Pemberian informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada masyarakat dianggap sebagai transparansi karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dapat diandalkan serta kepatuhannya terhadap hukum (Edowati *et al.*, 2021).

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari 27 pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat, banyak masyarakat Kabupaten Karawang berasumsi bahwa Kabupaten Karawang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya. Berdasarkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang TA 2019-2023, dapat diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019 - 2023 sebesar Rp. 24.003.793.889.362,- dengan rata-rata pertahun sebesar Rp.4.800.758.777.872,- dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp.23.523.089.395.214,- dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 4.704.617.879.043,-. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 99,98% pendapatan daerah mampu mencukupi belanja daerah pada setiap tahunnya dan hanya tersisa sebesar 0,02% atau Rp.96.140.898.830,-. Namun, dengan pendapatan sebesar tersebut

Pemerintah Kabupaten Karawang tetap mendapatkan kritikan dari publik atas beberapa kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Karawang. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata, jalan yang rusak, bangunan sekolah yang rusak ambruk, rumah warga roboh, pengangguran yang belum tertangani, dan banyak keluhan lainnya dari warga. Namun, menurut Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), pengelolaan keuangan pemerintah daerah baik, jelas, dan akuntabel. Meskipun Kabupaten Karawang dapat mencapai dan mempertahankan opini audit dari BPK dengan penilaian maksimal, atau WTP, selama 8 tahun berturut-turut. Namun, sangat disayangkan bahwa masih banyak temuan yang menunjukkan bahwa ada penyelewengan dana yang dilakukan. Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2022, yang dirilis pada 15 Mei 2023, menunjukkan bahwa sebanyak 460 paket pekerjaan dari belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas PUPR Karawang tidak memenuhi persyaratan. Temuan ini didukung oleh hasil audit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2022, yang menunjukkan realisasi belanja modal JIJ sebesar 97,57% dari anggaran. Dimana, Realisasi belanja tersebut naik sebesar 7,62% dibanding realisasi TA 2021. Selain itu, anggaran Belanja Modal JIJ TA 2022 tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya terealisasi sebesar 97,52% yang diantaranya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan serta Bidang Sumber Daya Air (SDA) ([www.bpk.go.id/](http://www.bpk.go.id/), 2024).

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan bahwa ada hubungan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dan jumlah dana yang disediakan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif berkontribusi pada peningkatan kinerja suatu organisasi atau lembaga (Suryana *et al.*, 2017; darma, 2019; Juliarti, 2019). Namun, ini bertentangan dengan temuan penelitian oleh (Veronica *et al.*, 2020; Agustina & Saifanur, 2020; Nurhaeda & Tenriola, 2022), yang menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi, atau kelompok sasaran atau

pengguna jasa organisasi publik, kita dapat lebih memahami konsep kinerja keuangan organisasi publik. Menurut (Darma, 2019; Juliarti, 2019; Jatmiko, 2019; Nurhaeda & Tenriola, 2022), penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan konsep akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan transparansi diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi harus dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap kinerja keuangan, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Studi ini akan disebut sebagai "**Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022**".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam bentuk kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer karena teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dimana, jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 187 orang dari 3 SKPD Kabupaten Karawang dengan teknik penentuan sampling menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 orang pegawai. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Pengujian hipotesis menggunakan Uji t dengan taraf kesalahan  $\alpha = 0,05$ .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Profil Responden

Profil responden dalam penelitian ini terbagi dalam lima karakteristik berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama bekerja dan jabatan dalam pekerjaan. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 atau 53% berusia antara 25,1 – 40 tahun sebanyak 41 atau 41% dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 31 atau 31% dan sudah bekerja selama 3,1 – 6 tahun sebanyak 44 atau 44% serta memiliki jabatan dalam bekerja sebagai fungsional umum sebanyak 29 atau 29%.

**Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

Adapun rekapitulasi hasil tanggapan 99 responden pada variabel pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Masing-Masing Variabel Penelitian**

No	Dimensi	Skor	Kategori Jawaban
<b>Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
1	Perencanaan	422,5	Sangat Setuju
2	Pelaksanaan	404,3	Setuju
3	Penatausahaan	348,5	Setuju
4	Pelaporan	320,5	Cukup Setuju
5	Pertanggungjawaban	410,0	Setuju
Jumlah Skor		1.905,8	
Rata-rata Skor		381,2	Setuju
<b>Variabel Akuntabilitas</b>			
1	Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	418,5	Sangat Setuju
2	Akuntabilitas Proses	422,8	Sangat Setuju
3	Akuntabilitas Program	414,0	Setuju
4	Akuntabilitas Kebijakan	401,0	Setuju
Jumlah Skor		1.656,3	
Rata-rata Skor		414,1	1.656,3
<b>Variabel Transparansi</b>			
1	Informatif	411,3	Setuju
2	Keterbukaan	406,5	Setuju
3	Pengungkapan	403,0	Setuju
Jumlah Skor		1.220,8	
Rata-rata Skor		406,9	Setuju
<b>Variabel Kinerja Keuangan Daerah</b>			
1	Masukan	440,5	Setuju
2	Proses	421,0	Sangat Setuju
3	Keluaran	416,5	Sangat Setuju
4	Hasil	387,5	Setuju
5	Manfaat	389,0	Setuju
Jumlah Skor		2.054,5	
Rata-rata Skor		410,9	Setuju

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah dengan nilai skor rata-rata sebesar 381,2 berada pada kategori jawaban setuju karena berada pada rentang nilai antara 336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada tiga SKPD, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dipersepsikan dengan baik oleh responden, kemudian pada variabel akuntabilitas dengan nilai skor rata-rata sebesar 414,1 berada pada kategori jawaban setuju karena berada pada rentang nilai antara 336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa akuntabilitas pada tiga SKPD, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat

Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dipersepsikan dengan baik oleh responden sedangkan untuk variabel transparansi dengan nilai skor rata-rata sebesar 406,9 berada pada kategori jawaban setuju karena berada pada rentang nilai antara 336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa transparansi pada tiga SKPD, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dipersepsikan dengan baik oleh responden dan pada variabel kinerja keuangan daerah dengan nilai skor rata-rata sebesar 410,9 berada pada kategori jawaban setuju karena berada pada rentang nilai antara 336,6 sampai 415,8. Posisi nilai skor rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah pada tiga SKPD, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dipersepsikan dengan baik oleh responden.

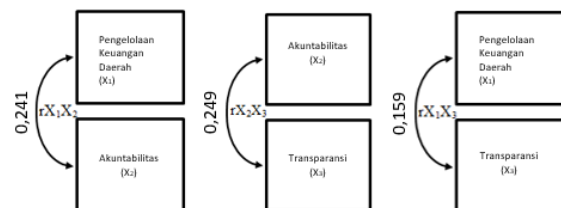
**Analisis Verifikatif Dan Uji Hipotesis Analisis Korelasi**

**Tabel 2 Hasil Analisis Korelasi**

No	Korelasi	Nilai Koefisien Korelasi	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	Pengelolaan keuangan daerah dengan Akuntabilitas	0,241	0,20 - 0,399	Rendah
2	Akuntabilitas dengan Transparansi	0,249	0,20 - 0,399	Rendah
3	Pengelolaan Keuangan daerah dengan Transparansi	0,159	0,00 - 0,199	angat Rendah

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai korelasi antar variabel  $X_i$  dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Nilai Korelasi Antar Variabel Bebas**  
Sumber : Data Diolah, 2024

**Analisis Jalur**

**Tabel 2 Hasil Analisis Jalur**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	9.057	5.226		1.733	.086
	Pengelolaan Keuangan Daerah	.260	.056	.330	4.630	.000
	Akuntabilitas	.172	.083	.185	2.063	.042
	Transparansi	.205	.074	.243	2.782	.007

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Data Diolah, 2024

Keterangan:

1. Nilai koefisien jalur antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah yaitu sebesar 0,330 sehingga diperoleh persamaan  $Y=0,330.X_1$ .
2. Nilai koefisien jalur antara akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah yaitu sebesar 0,185 sehingga diperoleh persamaan  $Y=0,185.X_2$ .
3. Nilai koefisien jalur antara transparansi terhadap kinerja keuangan daerah yaitu sebesar 0,243 sehingga diperoleh persamaan  $Y=0,243.X_3$ .

Dari hasil tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = (0,330.X_1) + (0,185). X_2 + (0,243). X_3 + \epsilon$$

**Pengaruh Parsial dan Simultan**

1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara parsial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah yaitu 0,1364 atau sebesar 13,64%.
2. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara parsial akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah yaitu 0,0563 atau sebesar 5,63%.
3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara parsial transparansi terhadap kinerja keuangan daerah yaitu 0,0855 atau sebesar 8,55%.
4. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besarnya pengaruh secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah yaitu 0,2781 atau sebesar 27,81% sedangkan sisanya 72,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti ( $\epsilon$ ).

**Uji Hipotesis**

**Hipotesis Korelasi Antar Variabel Bebas**

Adapun hasil pengujian hipotesis korelasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas, karena  $t_{hitung} (2,446) > t_{tabel} (1,985)$  pada tingkat kesalahan 5% dengan  $db = n - 2 = 99 - 2 = 97$ . Hasil ini memberikan arti bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh 3 SKPD yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Hasil ini didukung oleh pendapat (Mardiasmo, 2004) dan hasil penelitian (Kromen *et al.*, 2023) bahwa tata kelola APBD merupakan kerangka yang lengkap yang terdiri dari pertanggungjawaban, transparansi, dan tata kelola keuangan, yang memungkinkan untuk memaksimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2004, dalam Kroeman *et al.*, 2023), tata kelola yang baik adalah syarat untuk keberhasilan sistem akuntabilitas keuangan organisasi. Menurut penjelasan ini, tata kelola keuangan daerah, yang diwakili oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berada di tempat yang tepat selama penerapan manajemen pemerintah yang terpercaya. Selain belanja daerah, APBD juga terkait dengan pendapatan daerah karena mencakup dana alokasi umum untuk mempengaruhi sumber pendapatan asli daerah (Ramadhan, 2012).
2. terdapat hubungan antara akuntabilitas dengan transparansi karena  $t_{hitung} (2,532) > t_{tabel} (1,985)$  pada tingkat kesalahan 5% dengan  $db = n - 2 = 99 - 2 = 97$ . Hasil ini memberikan arti bahwa semakin baik akuntabilitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh 3 SKPD yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, maka akan dapat meningkatkan transparansi sehingga publik akan dengan mudah mendapatkan informasi dari SKPD tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010) bahwa agen (pemerintah)

bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaporkan kepada pemberi mandat (prinsipal) tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Karena itu, pemerintah harus memberikan akses publik ke informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya (Tamara & Konde, 2016; Alfarizi, 2020).

3. Tidak terdapat hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan transparansi karena  $t_{hitung} (1,586) < t_{tabel} (1,985)$  pada tingkat kesalahan 5% dengan  $db = n - 2 = 99 - 2 = 97$ . Hasil ini didukung oleh (Aliyah, 2012; Fajaruddin, 2020) bahwa baik pemerintah daerah maupun SKPD di bawah pemerintah daerah nampaknya belum dapat melakukan perbaikan dalam penyajian pelaporan keuangan daerah. Tidak terdapat hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan transparansi disebabkan masih terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan baik yang dilaksanakan secara organisasional maupun individual seperti dalam tahapan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan anggaran di 3 SKPD yang dijadikan objek penelitian ini kurang transparan.

### Hipotesis Pengaruh Parsial

1. Berdasarkan hasil analisis dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5%, *degree of freedom* (df) =  $(n-2) = 99 - 2 = 97$  diperoleh  $t_{tabel} = 1,985$ . Dimana hasil analisis diperoleh bahwa  $t_{hitung}$  memiliki nilai 4,630 dengan nilai Sig. Sebesar 0,000. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa nilai sig.  $(0,000) < \alpha (0,05)$  dan  $t_{hitung} (4,630) > t_{tabel} (1,985)$  maka  $H_0$  tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini didukung dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh ((Suryana *et al.*, 2017; Darma, 2019; Juliarti, 2019) bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif berkontribusi pada peningkatan kinerja suatu organisasi atau lembaga. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Veronica *et al.*, 2020; Agustina & Saifanur, 2020; Nurhaeda & Tenriola, 2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh pengelolaan keuangan daerah.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5%, *degree of freedom* (df) =  $(n-2) = 99 - 2 = 97$  diperoleh  $t_{tabel} = 1,985$ . Dimana hasil analisis diperoleh bahwa  $t_{hitung}$  memiliki nilai 2,063 dengan nilai Sig. Sebesar 0,042. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa nilai sig.  $(0,042) < \alpha (0,05)$  dan  $t_{hitung} (2,063) > t_{tabel} (1,985)$  maka  $H_0$  tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini didukung dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh (Khairi, Y. D., & Meiranto, W., 2021; Auditya, L., Husaini, & Lismawati, 2021; Rantepulung, O., Ratang, W., & Mollet, J. A., 2023) bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah, konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintah (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya (Jefri, 2018; Auditya, Husaini & Lismawati, 2021). Namun, nyatanya hal ini bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya (Jitmau *et al.*, 2017; Astuti, 2013). Rendanya pengaruh akuntabilitas menunjukkan bahwa masih lemahnya komitmen dan dukungan pimpinan serta keterbatasan kapasitas SDM yang menangani Sistem AKIP. Selain itu belum terintegrasinya berbagai peraturan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan belum terbangunnya sistem informasi kinerja di berbagai instansi pemerintah. Padahal, akuntabilitas merupakan konsep yang muncul dalam paradigma *governance*. Konsep tersebut menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Berdasarkan hasil analisis dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5%, *degree of freedom* (df) =  $(n-2) = 99 - 2 = 97$  diperoleh  $t_{tabel} = 1,985$ . Dimana hasil analisis diperoleh bahwa  $t_{hitung}$  memiliki nilai 2,782 dengan nilai Sig. Sebesar 0,007. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa nilai sig.  $(0,007) < \alpha (0,05)$  dan  $t_{hitung} (2,782) > t_{tabel} (1,985)$  maka  $H_0$  tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja

keuangan daerah. Hasil ini didukung dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh (Zhao, 2017; Schillemans & Bjurström, 2019; Jeriansyah, W., & Mappanyukki, R., 2020). Namun, berbeda dengan temuan penelitian (Astuti, 2013; Laoli, 2019), tidak ada hubungan antara transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah. Rendanya pengaruh transparansi menunjukkan bahwa pelayanan publik belum berkualitas yang disebabkan masalah SDM, baik menyangkut komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM serta sistem birokrasi yang diterapkan pada 3 SKPD yaitu yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. Sikap pemerintah yang kurang transparan akan berdampak pada semakin tingginya tingkat keterjadian korupsi di pemerintah daerah karena transparansi dapat membuat pemerintah lebih percaya diri saat membuat kebijakan, dan memberikan publik kesempatan untuk ikut serta dalam prosesnya.

### Hipotesis Pengaruh Simultan

Berdasarkan hasil analisis dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5 %, *degree of freedom* (df) = (n-4) = 99 - 4 = 95, diperoleh  $F_{\text{tabel}} = 2,47$ . Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa besaran nilai  $F_{\text{hitung}}$  yaitu sebesar 13,607 dengan nilai Sig. 0,000. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa nilai Sig. (0,000) <  $\alpha$  (0,05) dan  $F_{\text{hitung}}$  (13,607) >  $F_{\text{tabel}}$  (2,47) maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang, sebab pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi adalah variabel-variabel yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang dalam suatu organisasi Pemerintahan. Hasil ini sesuai dengan pendapat (Mardasimo, 2019) bahwa dari sudut pandang birokrasi, produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan persamaan pelayanan memiliki keterkaitan erat dengan kinerja keuangan organisasi publik. Serta didukung juga dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu

(Darma, 2019; Juliarti, 2019, Jatmiko, 2019; Nurhaeda & Tenriola, 2022).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas namun memiliki tingkat hubungan yang rendah.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas dengan transparansi namun memiliki tingkat hubungan yang rendah.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan namun positif antara pengelolaan keuangan daerah dengan transparansi karena memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah.
4. Pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena memiliki pengaruh sebesar 13,64%.
5. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena memiliki pengaruh sebesar 5,63%.
6. Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena memiliki pengaruh sebesar 8,55%.
7. Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang karena sebesar 27,8% sedangkan sisanya 72,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti ( $\epsilon$ ).

### Saran

Berdasarkan dari keterbatasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu :

1. Adanya pengelolaan keuangan yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang lebih baik lagi, karena jika keuangan daerah dikelola secara bertanggung jawab dapat membuat dana-dana yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan perekonomian Masyarakat.
2. Bagi 3 SKPD Kabupaten Karawang lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat menunjang tata kelola pemerintahan yang

- baik dan menerapkannya dalam pengelolaan anggaran dengan memberikan bimbingan dan pelatihan secara berkala kepada pegawai SKPD Kabupaten Karawang tentang administrasi pengelolaan anggaran.
3. Bagi 3 SKPD Kabupaten Karawang lebih meningkatkan sosialisasi maupun penyuluhan terkait dengan peraturan yang diharuskan pemerintah agar mempertanggungjawabkan laporan keuangannya agar menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran agar terciptanya laporan keuangan yang transparan, serta melaporkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah.
  4. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di 3 SKPD Kabupaten Karawang, khususnya dalam segi pelaksanaan, sebaiknya proses pelaksanaan belanja modal lebih ditingkatkan dengan cara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah lebih diawasi oleh DPRD agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta masyarakat dapat merasakan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Karawang.
  5. Untuk mengatasi masalah penerapan *Good Governance*, khususnya dalam segi penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebaiknya proses penerapan supremasi hukum pada 3 SKPD Kabupaten Karawang lebih di perketat dan bagi pelaku di beri hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera.
  6. Untuk mengatasi masalah kinerja 3 SKPD Kabupaten Karawang, sebaiknya proses pelaksanaan kegiatan lebih di tingkatkan dengan cara pemimpin harus memonitoring setiap perencanaan dan pelaksanaan program kerja agar sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan tidak ada lagi kegiatan yang tidak terjadwal.
  7. Timpangnya hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain dengan jumlah sampel yang berbeda agar dapat mengetahui kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Dan bagi penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan variabel lain sebagai variabel moderator yang dapat memperkuat hubungan antara

bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Variabel-variabel lain yang bisa dipertimbangkan sebagai variabel *intervening* misalnya belanja pemerintah, *independent financing*, opini BPK, rasio pajak, rasio retribusi, SILPA dan lain sebagainya. Adapun pemilihan variabel-variabel tersebut karena hubungannya dengan kinerja keuangan daerah yang didukung oleh sejumlah teori serta dengan menggunakan alat analisis yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>.
- Darma, N. D. A. (2019). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Darwis, H., Ohorella, R. W. U., & Zainuddin, Z. (2022). Transparency and accountability of regional financial management: Accessibility of financial statements as a moderation. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(9), 243–249. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i9.2066>.
- Jeriansyah, W., & Mappanyukki, R. (2020). The Effect of Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *International Journal of Asian Social Science*, 10(12), 721–729. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.1012.721.729>.
- Khairi, Y. D., & Meiranto, W. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah



- Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. . (2023). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 460–468.
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, 7(2), 161–170. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>.
- Purnama, F., & Nadirsyah. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 27(2), 58–66. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>.
- Rantepulung, O., Ratang, W., & Mollet, J. A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dimediasi Oleh Pengawasan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 8(2), 108–133.
- Riswanto, N. (2016). Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management on Local Government Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–7. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75336/NATAK>
- RISWANTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Sudiantini, D., Suryadinata, A., Rahayu, A. S., Aprilia, A. B., & Lestari, A. D. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Scope Of Financial Management. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 60–65. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.196>.
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, Bumd Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat Dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 63–79. <https://doi.org/10.31942/akses.v13i2.3242>.
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966–2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>